

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 29
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 27 September 2016
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membahas Permasalahan Tata Ruang dan RPP Kawasan Strategis Nasional</li><li>2. Persiapan Pembahasan RUU tentang Pertanahan</li></ol>
Ketua Rapat	: <b>Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 25 Anggota Komisi II DPR RI

## I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin, 27 September 2016 dibuka pada pukul 10.50 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan Membahas Permasalahan Tata Ruang dan RPP Kawasan Strategis Nasional dan Persiapan Pembahasan RUU tentang Pertanahan
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan

## II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tentang Kawasan Strategis Nasional, namun Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk menyempurnakan Kawasan Strategis Nasional tersebut karena masih ada wilayah yang berpotensi menjadi kawasan strategis namun tidak dimasukkan menjadi Kawasan Strategis Nasional.
- B. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN meningkatkan pelayanan BPN dalam pengurusan hak-hak atas tanah mengingat masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan BPN yang lama berbelit-belit, dan berbiaya mahal serta menindak tegas praktek pungutan liar.

- C. Komisi II DPR RI sepakat dengan usulan Kementerian ATR/BPN untuk membuat Pansus untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan dengan menghadirkan seluruh Kementerian terkait.
- D. Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk segera menyelesaikan koordinasi internal pemerintahan antar kementerian terkait, untuk menyelesaikan masalah pertanahan dan Kawasan Strategis Nasional secara komprehensif.
- E. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk segera menyerahkan DIM RUU Pertanahan kepada Komisi II DPR RI, mengingat RUU Pertanahan sudah dikeluarkan Surpresnya oleh Presiden untuk dibahas bersama-sama dengan Komisi II DPR RI agar permasalahan pertanahan yang carut marut ini dapat diselesaikan secara komprehensif.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

**Jakarta, 27 September 2016**  
**Wakil Ketua Komisi II DPR RI**

ttd

**Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si**  
**A-93**